

POLICY BRIEF

RIPPP : MEMPERKUAT MAKNA PEMBANGUNAN BAGI PENGHIDUPAN OAP

MASUKAN BAGI PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS PAPUA

DISUSUN OLEH



PAPUA CENTER



UNIVERSITAS
INDONESIA
Widyadarmas, Pendidikan, Kualitas

LPPSP

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN POLITIK



2022

Memperkuat Makna Pembangunan Bagi Penghidupan OAP

Memberikan makna pembangunan bagi Orang Asli Papua menjadi pesan penting dalam pengembangan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang tengah dirumuskan saat ini. Pembangunan harus menyentuh kebutuhan dan memelihara penghidupan masyarakat dalam ekosistem dan kelestarian sumber hidup masyarakat. Dokumen ini penting, dan strategik dan harus mengandung nilai dasar, peta jalan dan kerangka komitmen untuk mencapai tujuan yang dikandungnya. RIPPP akan menentukan corak serta perjalanan pembangunan dan selanjutnya memastikan pencapaian kesejahteraan dan keadilan masyarakat Papua dan Papua Barat di masa yang akan datang

Sejumlah wacana berkembang terkait pembangunan di Papua selama ini. Pembangunan dianggap memarjinalkan OAP, menguntungkan pendatang dan tidak menyentuh OAP. Sebagai jawaban, RIPPP memiliki komitmen untuk membangun dan melindungi OAP yang mana menjadi subyek sentral bagi pembangunan yang saat ini dicanangkan. Secara prinsipil ada dua ranah pembangunan yang harus disentuh :

1. Pemeliharaan Ruang Penghidupan (*livelihood*) bagi warga masyarakat yang masih mengandalkan mata pencaharian berburu dan meramu
2. Transformasi masyarakat asli menuju penghidupan modern berbasis konektivitas multi-moda yang dibangun Pemerintah saat ini.

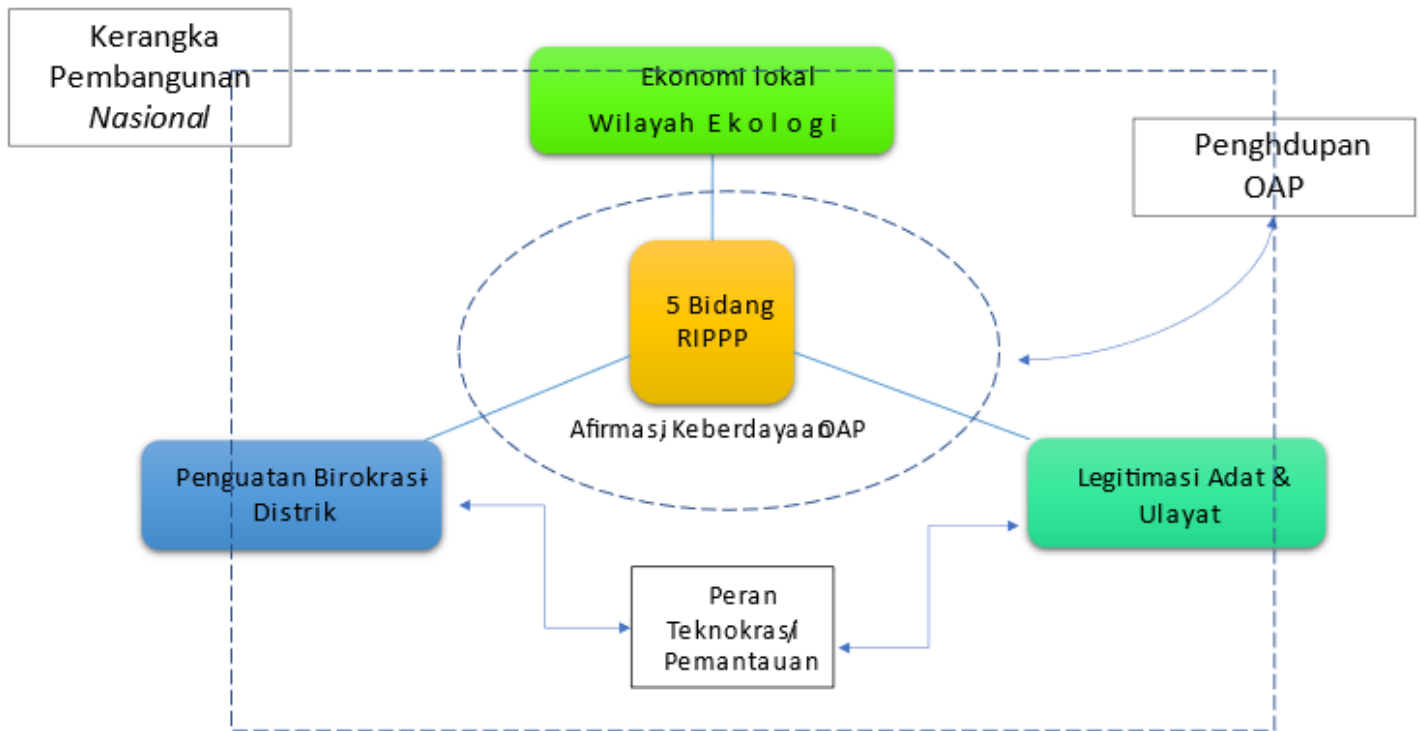
Seperti yang telah dicakup dalam Perpres 107, RIPPP akan mengacu pada lima bidang dasar. Lima bidang dasar ini menjadi prioritas dan fondasi dari kegiatan, yakni bidang. Dalam konteks penjabaran kebijakan dan implementasi ke lima bidang ini, menjadi penting bagi kita untuk memastikan adanya pemahaman akan konteks masyarakat di Tanah Papua. Dalam penerapan percepatan pembangunan di Papua, penting meletakkan dasar (dan sekaligus konteks) manusia dalam lingkungannya. Ada tiga prinsip mendasar yang penting menjadi acuan sebagai berikut

1. Pengembangan penghidupan (*livelihood*) berbasis potensi sumberdaya Wilayah Ekologi
2. Afirmasi dan legitimasi institusi Adat.
3. Penguatan kemampuan manajemen pembangunan di kalangan Aparatur Pemerintahan

Secara holistik, pandangan dan konsepsi holistik pembangunan dapat digambarkan lewat diagram berikut ini:

Gambar 1. Usulan Kerangka Keberdayaan OAP dalam RIPPP

Konsepsi Dasar RIPPP: Papua Pintu Gerbang Indonesia ke Pasifik



Melalui rekomendasi yang kami sampaikan , Wilayah Ekologi menjadi konsep sentral dalam pembangunan di Tanah Papua. Pemahaman tentang potensi dan karakteristik kawasan yang ada menjadi penting: wilayah pesisir, rawa-sungai, perbukitan dan pegunungan. Ketujuh Wilayah Adat yang ada di Papua dan Papua Barat juga menjadi referensi penting, sebagai kelembagaan identitas kultural. Diharapkan, bahwa wilayah ekologi dimana masyarakat asli menjalankan penghidupannya dapat dilanjutkan dalam skala ekonomi lokal dan selanjutnya dapat dikembangkan secara bertahap dalam sebuah kerangka transformasi bertahap.

Pendidikan dan Fokus Ekonomi Lokal

Pembangunan SDM menjadi dasar dari kemampuan OAP menyesuaikan dengan perubahan sosial yang cepat terjadi. Ada dua dimensi yang penting dicatat sebagai berikut :

Pertama adalah Pendidikan untuk penghidupan berbasis ekonomi lokal. Konsisten dengan usulan Pembangunan Berbasis Wilayah Ekologi, maka **Pendidikan Berbasiskan Kebutuhan Lokal**. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan kurikulum nasional dan berbagai macam kearifan serta pengetahuan lokal masyarakat. Dalam konteks Otsus terkini, pemerintah daerah memiliki peran untuk melakukannya sehingga upaya ini perlu direalisasikan pada Otsus dua puluh tahun mendatang. Setidaknya terdapat beberapa alternatif dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis dan mengakomodasi prinsip : a) literasi dan transliterasi; b) Etnosains dan c) Lembaga pendidikan tinggi khusus.

Aspek yang kedua adalah pembangunan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi modern. Selama puluhan tahun bisa dikatakan sektor pertambangan dan penggalan merupakan sumber PDRB terbesar di Papua. Namun begitu, belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup OAP. Dalam hal ini, RIPPV perlu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan dapat mengisi peluang yang tumbuh di sektor ekonomi (bidang pengolahan dan industri jasa) yang tumbuh dari pembangunan infrastruktur konektivitas yang dibangun pesat saat ini.

Papua memiliki potensi ekonomi alam non-tambang yang berlimpah. Namun penting untuk mengembangkan “ekonomi pekarangan” yang bersifat lokal dan dekat dengan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Papua masih terdapat perekonomian tradisional yang bersifat subsisten dan memerlukan transformasi yang tepat hingga mampu berjalan beriringan dengan ekonomi modern. OAP merupakan sasaran utama dari manfaat Otsus sehingga kita harus menempatkan mereka sebagai pemain utama (subyek) perekonomian lokal. Minimal, dalam membangun basis penghidupan dari pekarangan tempat tinggal di kampung kampung. Selanjutnya, memperhatikan akses pada tanah ulayat dan merancang proses transformasi menuju ekonomi modern secara bertahap. Prinsipnya, perekonomian yang dirancang kedepan harus mampu melindungi dan membekali OAP untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi.

Integrasi Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Aspek penting selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Poin penting yang dapat disampaikan adalah adanya rencana umum pusat pertumbuhan yang akomodatif dan dinamis; pembangunan infrastruktur yang cukup; fasilitas ekonomi dan sosial; membangun industri pendorong yang pada akhirnya akan memperkuat wilayah pertumbuhan. Kita tidak bisa lagi menjalankan pembangunan yang bersifat sektoral dan berorientasi pada “proyek” semata. Konektivitas menjadi kata kunci utama sehingga keterhubungan antara satu daerah dengan daerah di seluruh tanah Papua dapat terwujud. Sebagai contohnya kasus Trans Papua di mana diperlukan pengembangan pusat pertumbuhan koridor jalan Trans Papua, persinggahan titik tertentu, prasarana dan sarana transportasi, dan pom bensin.

Selain itu, perhatian terhadap konektivitas antar kampung juga mendasar. Kampung perlu diberikan akses ke kampung lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian kondisi di setiap wilayah. Dapat menggunakan jalur udara, jalur darat, dan jalur air. Contohnya untuk wilayah di dekat danau, lebih cocok diberikan akses jalur air seperti perahu atau kapal. Untuk konektivitas udara perlu dibuat bandara perintis dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran penduduk. Konektivitas laut dan sungai perlu dibuat pelabuhan dan gudang pelabuhan. Dalam segi infrastruktur, perlu ditingkatkan di wilayah pedalaman Papua berkaitan dengan kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan pengolahan air limbah.

Penguatan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Poin terakhir yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemerintahan. Selama berjalannya Otsus periode 2022-2021 terkesan adanya *gap*/kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam tiga seri diskusi yang dilaksanakan, pembahasan terkait dengan tata kelola menjadi sorotan dari banyak narasumber/pembahas. Otsus kedepan memberikan ruang bagi hadirnya provinsi dan kabupaten baru di tanah Papua sebagai salah satu solusi pengelolaan pembangunan. Hal ini tentunya perlu memperhatikan beberapa hal lain yang esensial.

a) Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu persoalan yang akan dihadapi dari pelaksanaan Otsus kedepan adalah kesiapan ASN untuk menggerakkan roda pemerintahan berdasarkan aturan Otsus. Adanya pemekaran wilayah akan menuntut meningkatnya kebutuhan akan ASN. Selain itu, pembangunan yang berbasis hasil menuntut kesiapan dan kecakapan ASN untuk dapat menopang pembangunan dan roda pemerintahan. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah dalam menyiapkan jumlah ASN yang berkualitas menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Kualitas individu aparatur Pemda harus ditingkatkan sehingga aparatur memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja untuk dapat menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Hal ini penting mengingat karena ke depannya, regulasi Otsus yang sekarang memerlukan kapasitas administrasi yang kuat. Aparatur Pemda dilatih harus sesuai dengan bidangnya.

b) Evaluasi Pembangunan

Hal terakhir yang penting diperhatikan adalah evaluasi pembangunan dalam kerangka capaian Otsus yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Evaluasi pembangunan yang menjadi perhatian disini terkait dengan penggunaan anggaran disertai dengan output dan outcome yang terukur. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi sebagai berikut:

- RAPBD/APBD-dan pertanggungjawaban menjelaskan program/kegiatan otsus
- Mengefektifkan evaluasi anggaran dan evaluasi pertanggungjawaban di provinsi dan Kementrian Dalam Negeri
- RKA dan DPA DPD menjelaskan ukuran output dan outcome serta lokasi kegiatan
- LKPP dan LKJP perlu memuat program yang dibiayai dari sumber Otsus
- Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD) disusun dan menjelaskan program dari dana otsus

PENUTUP

Kita berharap bahwa pelaksanaan Otsus periode 2022-2041 bisa dijalankan dengan optimal dan memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya dan bagi OAP pada khususnya. Papua Center UI sebagai sebuah Lembaga kajian yang khusus memberikan perhatian pada berbagai isu di Papua sejak tahun 2012, berkomitmen untuk mendukung pemerintah secara aktif dan siap dilibatkan guna mensukseskan Otsus di Papua. Harapannya, Policy Brief ini menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah di tanah Papua dalam menjalankan Otsus dua puluh tahun mendatang.

LAMPIRAN

Round Table Discussion 1

“Pengelolaan Anggaran dan Output Otonomi Khusus di Tanah Papua”

Kamis, 2 November 2021

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB / 15.00 - 18.00 WIT

Moderator : Budhi Dharma (Ketua Unit Kajian Papua LPPSP FISIP UI)

Pembicara:

- Keynote Speech oleh Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi mengenai “Agenda Transformasi Papua di Era Millenial”.
- Materi “Struktur Anggaran dalam Pengelolaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat” oleh **Prof. Dr. Agustinus Salle** (Guru Besar Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih)
- Materi “Sumber Anggaran dan Keberlanjutan Pembangunan” oleh **Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si** (Dosen/Peneliti dari Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI)
- Materi “Permasalahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Melalui Otonomi Khusus: Praktik Pemerintah Daerah” **Dr. John Boekorsyom** (Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua)
- Materi “Kendala Dalam Perencanaan Pembangunan” oleh **Prof. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc** (Dosen/Peneliti dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)

Round Table Discussion 2

“Kondisi Sosial Politik Lokal dan Pengelolaan Otonomi Khusus di Tanah Papua”

Kamis, 11 November 2021

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB / 15.00 - 18.00 WIT

Moderator : Lala Siti Sahara, M.Si (Unit Kajian Papua LPPSP FISIP UI)

Pembicara:

- Materi “Penguatan Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah” oleh **Prof Dr. Agustinus Fatem, MT** (Guru Besar Ilmu Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih)
- Materi “Perspektif Gender dalam Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat” oleh **Dr. Marlina Flassy, M.Si** (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih)
- Materi “Pengelolaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat” oleh **Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MSi.,** (Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia)
- Materi “Kondisi Politik Lokal dalam Implementasi Otonomi Khusus” oleh **Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto** (Guru Besar Antropologi Sosial, FISIP UI)

LAMPIRAN

Round Table Discussion 3

“Dimensi Perencanaan Pemerintahan Berbasis Wilayah Adat: Tinjauan Bagi Pengembangan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)”

Kamis, 6 November 2020

Waktu: 13.00-16.00 WIB/15.00-18.00 WIT

Moderator Efi Arbay, SE, MA

Pembicara:

- Materi “Perkembangan Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua” oleh **Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D** (Staf Ahli Bidang Pemerataan Wilayah Desk Papua BAPPENAS)
- Materi “Tantangan Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam Implementasi Otonomi Khusus” oleh **Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP, M. Si** (Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)
- Materi “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus berdasarkan RIPPP” oleh **Prof. Dr. Akbar Silo** (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih)
- Materi “Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pembangunan Papua” oleh **Elizabeth Wambrau, MT, Ph.D** (Dosen Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih)